

Keputusan Uni Eropa Memberikan *Financial Assistance Package* Kepada Yunani Pada Tahun 2010

(*European Union Decision to Provide Financial Assistance Package to Greece in 2010*)

Sarwendah Okky Liesindriyati, Djoko Susilo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Jalan Kalimantan 37- Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342, Fax. (0331) 335586

Jember 68121, E-mail : fisip@unej.ac.id

E-mail penulis : okky.sarwendah@gmail.com, djokosusilo115@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keputusan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi di Yunani. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan dari keputusan yang diambil oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari jurnal, dokumen, dan website yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani adalah dengan memberikan bantuan dana talangan. Alasan utama Uni Eropa memberikan bantuan keuangan karena Yunani sedang mengalami krisis hutang luar negeri yang sangat parah. Alasan lain Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani adalah: 1. UE memberikan *Financial Assistance Package* kepada Yunani karena ada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara anggota UE. Sehingga, krisis utang luar negeri yang mereka alami memiliki efek domino terhadap stabilitas perekonomian kawasan Eropa; 2. UE menyetujui keputusan pemberian *Financial Assistance Package* kepada Yunani dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kepentingan ekonomi UE di Yunani dan desakan dari kalangan internal organisasi UE. Dan faktor eksternal, yaitu desakan dari kalangan eksternal UE untuk segera mengatasi permasalahan ekonomi di Yunani.

Kata Kunci: bantuan keuangan, hutang luar negeri, Uni Eropa, Yunani.

ABSTRACT

This paper aims to explain the EU's decision to handle the economic crisis in Greece. Specifically, this study aimed to identify the reasons of decisions taken by the European Union in overcoming economic crisis in Greece. To achieve the above purposes, the research method used was descriptive research collecting data through library (library research) sourced from journals, documents, and trusted websites. The research results showed that the decisions taken by the EU to overcome the economic crisis in Greece was by providing bailout. The main reason of the EU to provide financial assistance for Greece was that because Greece was in severe foreign debt crisis. Other reasons of the European Union in overcoming the economic crisis in Greece were: 1. there was mutual interdependence relationship between the EU member states. Thus, the foreign debt crisis in Greece led to domino effects on the stability of the European economy; 2. EU agreed to the decision on providing Financial Assistance Package to Greece due to internal factors, that is, economic interests of EU in Greece and the EU insistence from the EU's internal organization, and external factor, that is, the insistence from the external parties to immediately manage the economic problems in Greece.

Keywords: European Union, financial aid, foreign debt, Greece.

A. PENDAHULUAN

Eurozone, yakni 17 negara Uni Eropa (UE) yang tergabung dalam mata uang tunggal *euro*, sudah mulai menunjukkan gejala akan mengalami sebuah krisis besar karena masalah utang pemerintah Yunani (salah satu anggota Eurozone) yang tidak terbayarkan. Krisis itu cenderung semakin parah pada tahun 2011, yang bahkan jika kondisinya semakin buruk bisa mengancam kelangsungan sistem mata uang tunggal, *euro*.

Kemungkinan besar ada dua penyebab utama munculnya krisis di kawasan Eropa dan kedua penyebab itu boleh dikatakan muncul hampir bersamaan. Pertama, akibat defisit keuangan pemerintah dan utang publik yang sangat besar dari sejumlah negara anggota UE. Menurut laporan tahunan dari Komisi Eropa, rasio utang publik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 17 negara Eurozone terus meroket setelah krisis ekonomi global 2008-2009. Untuk tahun 2011, rasio itu diperkirakan mencapai hampir 88 persen, dan akan bertambah menjadi 88,7 persen dari PDB pada tahun 2012 (Tambunan, 2011). Khususnya Yunani yang sebenarnya sudah mengalami masalah defisit anggaran dan utang publik jauh sebelum krisis ekonomi global terjadi. Kedua, bisa saja sebagai akibat dari krisis ekonomi global 2008-2009 yang memperburuk kinerja ekonomi dari sebagian negara-negara Eurozone.

Krisis hutang luar negeri Yunani mencuat pada triwulan keempat tahun 2009 ketika pemerintah negara tersebut melaporkan revisi perkiraan defisit fiskal mereka kepada Eurostat. Defisit keuangan pemerintah Yunani yang semula dilaporkan hanya sekitar 3,7 persen terhadap PDB, menjadi sangat besar di dalam laporan revisi tersebut hingga mencapai sekitar 12 persen dari PDB (Surendro, 2010). Ketika diumumkan sebagai negara yang terancam gagal membayar utang luar negeri, nilai tukar Euro dengan US Dollar dan Yen kian merosot. Jumlah utang Yunani berkisar 350 miliar euro (setara dengan 499 miliar dollar AS), atau sekitar 160 persen dari PDB, yang berarti jauh di atas 60 persen dari PDB yang dianggap sebagai batas aman (Restu, 2012). Kondisi Yunani makin menurun setelah keluar pernyataan resmi dari pemerintahannya mengenai ketidakmampuan mereka mengatasi utangnya yang sebagian jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2010, terkecuali pemerintah Yunani bisa mendapat bantuan dana dari UE dan *International Monetary Fund* (IMF).

Kesalahan pemerintah Yunani dalam mengatur keuangannya dan melakukan manipulasi laporan keuangan, membuat kelayakan pemberian *Financial Assistance Package* (FAP) dari UE kepada Yunani dipertanyakan. Hal ini yang menyebabkan pertentangan besar di UE, Jerman sebagai salah satu negara yang memainkan peran penting dalam

pembuatan kebijakan di UE pada awalnya menolak permintaan Yunani. Dinamika politik Jerman, merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan untuk menalangi utang negara yang salah mengatur keuangannya.

Namun pada perkembangannya setelah negosiasi yang berat, akhirnya tercapai kesepakatan untuk memberikan FAP. Karena apabila krisis utang luar negeri tidak segera ditanggulangi akan memberikan tekanan depresiatif terutama karena faktor sentimen negatif. Utang luar negeri yang tidak terkendali dan bermasalah secara berkepanjangan (misalnya harus melalui proses *rescheduling* berulang-ulang) akan meningkatkan premi risiko dan biaya pinjaman yang pada akhirnya akan menurunkan *credit rating* dan memberi tekanan pada nilai tukar *euro*. Depresiasi euro akan memberikan tekanan terhadap inflasi melalui *pass through effect*, sehingga akan mengurangi dampak positif depresiasi *euro* terhadap transaksi berjalan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan berpegang pada kerangka pemikiran yang ada, maka penulis mengajukan hipotesis yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya dengan data-data dan informasi yang akurat, yaitu: UE memberikan *Financial Assistance Package* kepada Yunani karena ada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara anggota UE. Sehingga, krisis utang luar negeri yang mereka alami memiliki efek domino terhadap stabilitas perekonomian kawasan Eropa; UE menyepakati keputusan pemberian *Financial Assistance Package* kepada Yunani dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kepentingan ekonomi UE di Yunani dan desakan dari kalangan internal organisasi UE. Dan faktor eksternal, yaitu desakan dari kalangan eksternal UE untuk segera mengatasi permasalahan ekonomi di Yunani.

Diambilnya keputusan pemberian FAP oleh UE terhadap krisis ekonomi Yunani, dikarenakan Yunani tengah mengalami krisis utang luar negeri yang berpotensi gagal bayar. Penyebab krisis ekonomi Yunani adalah lemahnya disiplin anggaran, manajemen utang yang buruk serta ketidakmampuan Yunani untuk beradaptasi dengan standar ekonomi UE. Lemahnya disiplin anggaran terlihat dari pemborosan, korupsi dan manipulasi pembukuan. Tingginya defisit yang dialami Yunani dikhawatirkan berpotensi menyeret keseluruhan Eropa ke dalam krisis finansial. Maka, demi untuk mencegah krisis Yunani menyebar ke negara-negara lain di kawasan Eropa dan menghancurkan nilai tukar euro. UE yang merupakan organisasi regional dimana Yunani merupakan salah satu anggota, didesak oleh negara anggota lainnya (terutama Eurozone) untuk mengatasi krisis ekonomi di Yunani. Para petinggi UE beserta *European Central Bank* (ECB) pun selaku aktor-aktor yang terlibat dalam krisis Yunani melakukan pertemuan dan membuat keputusan

pembentukan FAP. Dana tersebut bertujuan untuk menghindari gempuran sentimen negatif pasar terhadap mata uang *euro*. Terutama juga ditujukan untuk menghindari krisis Yunani menyebar ke negara-negara lain di kawasan Eropa.

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka dalam penulisan jurnal ini penulis mengambil judul: "Keputusan Uni Eropa Memberikan *Financial Assistance Package* Kepada Yunani Pada Tahun 2010" dengan rumusan masalah "Mengapa UE memberikan *Financial Assistance Package* kepada Yunani pada tahun 2010?"

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembahasan kerangka dasar teori ini dikemukakan dengan menjelaskan perspektif (paradigma), teori dan tingkat analisis yang relevan terhadap kondisi yang terjadi dalam perekonomian UE saat ini. Fenomena hubungan yang terjadi antara krisis keuangan Yunani terhadap ketidakstabilan perekonomian EU dapat dianalisa dengan berbagai pendekatan-pendekatan serta perspektif, kemudian diikuti dengan teori dan pemaparan tingkat analisa dari penelitian ini. Penelitian ini memaparkan paradigma, teori dan tingkat analisa yang terdahulu yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam ketidakstabilan perekonomian UE saat ini yang disebabkan krisis keuangan yang terjadi di negara-negara UE saat ini guna untuk memberikan gagasan dan kerangka berpikir yang relevan dengan topik penelitian ini.

Sebelum memahami lebih dalam mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat analisa dalam pembahasan ini menggunakan tingkat analisa negara. Negara dalam pembahasan ini merupakan aktor utama sebagai pemain kunci dalam perekonomian UE. Meskipun aktor individu dan kelompok merupakan aktor dominan dalam ekonomi internasional, penelitian ini mengabaikan arti penting aktor tersebut karena penelitian ini memfokuskan pada perekonomian Yunani dan UE sebagai aktor hubungan ekonomi internasional.

Perspektif yang diambil untuk menggambarkan krisis keuangan Yunani adalah perspektif liberalisme. Kaum liberal mempunyai pandangan bahwa politik global adalah sesuatu hal yang kompleks. Dimana pola-pola yang terjadi dalam dunia internasional tidak lagi didominasi oleh perang, militer, isu keamanan dan peran suatu Negara saja, akan tetapi dunia internasional pada saat sekarang mempunyai kajian yang kompleks, seperti kajian-kajian yang menyangkut perekonomian, isu lingkungan, aktor non-negara (NGO), perusahaan multinasional (MNC) dan kelompok social lainnya. Kaum liberal juga mengutarakan isu-isu social seperti

hak azasi manusia, kesetaraan gender, kemiskinan dan pengangguran

1. Teori Interdependensi

Dari perspektif yang telah dikemukakan diatas mengenai paham liberalisme, teori yang digunakan dalam permasalahan yang terjadi dalam krisis keuangan Yunani serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi UE adalah teori interdependensi. Tokoh-tokoh dari teori interdependensi adalah Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. Teori interdependensi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah hubungan timbal-balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Dalam teori interdependensi dikemukakan bahwa Negara secara utuh tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu butuh peran negara lain sebagai complement untuk melakukan suatu hubungan. Interdependensi memandang bahwa kerjasama antara aktor-aktor internasional sudah ada sejak dahulu dalam hubungan internasional. Oleh karenanya politik internasional sesungguhnya tidak secara penuh bersifat anarkis.

2. Konsep Pressure Groups.

Penulis juga menggunakan konsep *Pressure Grup* untuk mendukung teori pembuatan keputusan yang salah satu faktornya membahas tentang adanya desakan dari internal organisasi UE dan dari kalangan di luar organisasi UE. Dalam konsep ini penulis akan mencoba menjelaskan bahwa adanya posisi kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi orang-orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan. Namun, kelompok-kelompok penekan tertentu sebenarnya mempunyai wakil-wakil mereka di pemerintah dan di badan-badan legislatif, tetapi hubungan antara para individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati.

Dalam memahami adanya konsep *Pressure Group* ini, akan dapat diketahui melalui penjelasan sebuah konsep lobi yang termasyhur di Amerika Serikat. Yang sebagian besar telah didasarkan pada peranan lobi politik bagi setiap kelompok penekan. Konsep lobi-lobi tersebut adalah bentuk aktifitas dari beberapa organisasi maupun kelompok yang menggentayangi ruang-ruang depan gedung legislative untuk menyudutkan para politisi dan pejabat tinggi para pemerintahan. Dan mengadakan campur tangan dengan pekerjaan-pekerjaan para senator dan anggota kongres, dengan para anggota kabinet dan para pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Asalmulanya, tindakan-tindakan ini diambil oleh wakil-wakil dari berbagai kelompok penekan itu sendiri. Secara bertahap, badan-badan terpisah dibentuk dengan mengkhususkan dirinya dalam hal '*lobbying*' yang berorientasikan pada kepentingan kelompok penekan tersendiri. Namun, juga terdapat

bentuk lobi yang menyewakan jasanya untuk kelompok yang mempunyai pandangan politik yang sama dan menolak untuk membantu kelompok-kelompok yang berlainan pandangan politiknya (Francis, 2009).

3. Teori Pembuatan Keputusan

Menurut Richard Snyder, pengertian pembuatan keputusan (*decision making*) adalah sebagai rangkaian kegiatan yang menghasilkan pemilihan sebarang tindakan dari seperangkat alternative tindakan secara sosial, yang dimaksudkan untuk menghasilkan keadaan khusus di masa mendatang yang dibayangkan oleh pembuat keputusan (Alex, 2010). Mereka juga menegaskan bahwa faktor *setting* secara internal maupun eksternal berpengaruh terhadap diambilnya suatu kebijakan keputusan luar negeri oleh negara. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari negara.

Snyder mengasumsikan semua keputusan adalah rasional dengan mempertimbangkan *cost and benefit, pain and gain, dan utility and probability* untuk memaksimalkan tujuan yang ingin di capai, meskipun tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai

C. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan jurnal ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka di mana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang merupakan suatu pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini memperlakukan kebijakan FAP sebagai variabel tergantung (*dependent variable*) atau variabel yang dijelaskan. Sedangkan kepentingan ekonomi dan peran regional UE sebagai variabel bebas (*independent variable*) atau variabel yang menjelaskan. Sedangkan teknik analisa data Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan, dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam meneliti dan menganalisa dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan Teori Interdependensi, Teori Pembuatan Keputusan, serta Konsep Pressure Groups. Untuk itu sebagai rangkaian kerangka

secara maksimal. Snyder mendefinisikan *decision making* sebagai sebuah proses yang menyangkut pemilihan sejumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, pemilihan alternatif sasaran yang ingin di terapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh pembuat keputusan untuk melahirkan peristiwa yang khusus pada masa mendatang demi kelangsungan kehidupan bangsa.

Dalam teori *decision making process*, Snyder memulai penjelasannya dengan menganalisa faktor-faktor yang relevan. Pertama, semua tindakan politik dilakukan oleh manusia yang konkret. Kedua, apabila seorang peneliti ingin memahami dari dinamika-dinamika dari tindakan ini, peneliti harus siap untuk memandang dunia dari perspektif pembuatan keputusan. Snyder berpendapat bahwa dalam usaha memahami tindakan Negara dengan tepat, sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang membuat keputusan penting yang menyebabkan timbulnya suatu tindakan tertentu dan menilai proses-proses intelektual dan interaktif yang ditempuh para pembuat keputusan dalam usaha mencapai suatu keputusan.

pemikiran, berikut hipotesis dalam jurnal ini: "Diambilnya keputusan pemberian FAP oleh UE terhadap krisis ekonomi Yunani, dikarena Yunani tengah mengalami krisis utang luar negeri yang berpotensi gagal bayar. Penyebab krisis ekonomi Yunani adalah lemahnya disiplin anggaran, menejemen utang yang buruk serta ketidakmampuan Yunani untuk beradaptasi dengan standar ekonomi UE. Lemahnya disiplin anggaran terlihat dari pemborosan, korupsi dan manipulasi pembukuan. Tingginya defisit yang dialami Yunani dikhawatirkan berpotensi menyeret keseluruhan Eropa ke dalam krisis finansial. Maka, demi untuk mencegah krisis Yunani menyebar ke negara-negara lain di kawasan Eropa dan menghancurkan nilai tukar euro. UE yang merupakan organisasi regional dimana Yunani merupakan salah satu anggota, didesak oleh negara anggota lainnya (terutama Eurozone) untuk mengatasi krisis ekonomi di Yunani. Para petinggi UE beserta *European Central Bank (ECB)* pun selaku aktor-aktor yang terlibat dalam krisis Yunani melakukan pertemuan dan membuat keputusan pembentukan FAP. Dana tersebut bertujuan untuk menghindari gempuran sentimen negatif pasar terhadap mata uang euro. Terutama juga ditujukan untuk menghindari krisis Yunani menyebar ke negara-negara lain di kawasan Eropa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada jurnal ini yaitu dengan menekankan pada serangkaian latar belakang terjadinya krisis ekonomi di kawasan Eropa yang dimulai dari Yunani hingga mendorong Uni Eropa untuk mengatasi masalah hutang luar negeri tersebut dengan memberi bantuan keuangan. Keadaan tersebut diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda Yunani. Masalah ekonomi Yunani disebabkan oleh faktor domestik dan internasional.

Dari dalam negeri, pengeluaran pemerintah yang tinggi, kekakuan struktural, penghindaran (penggelapan) pajak, dan korupsi semua berkontribusi terhadap akumulasi utang Yunani selama dekade terakhir. Sedangkan dari faktor internasional, adopsi euro dan longgarnya penegakan aturan UE yang bertujuan untuk membatasi akumulasi utang juga diyakini telah memberikan kontribusi terhadap krisis Yunani. Hubungan saling ketergantungan yang terjadi diantara negara UE membuat rentannya masalah satu negara dan masalah negara tersebut akan mempengaruhi negara-negara yang ada di sekitarnya. Masalah ekonomi yang terjadi di Yunani akan mempengaruhi perekonomian UE disebabkan oleh organisasi internasional tersebut memiliki mata uang tunggal yang menyebabkan hubungan keuangan satu negara dengan negara lain.

1. Krisis Hutang Luar Negeri Yunani

Ketika *European Monetary Union* (EMU) dimulai pada 1999, Yunani adalah satu-satunya negara di UE yang ingin bergabung dengan Eurozone tapi tidak diizinkan. Yunani dinilai kurang sesuai dengan kriteria konvergensi. Namun, hanya dua tahun kemudian pada bulan Juni 2000 Dewan Eropa membuat keputusan akhir bahwa Yunani siap untuk bergabung dengan EMU. Pada 1 Januari 2001 Yunani mencapai integrasi moneter penuh di Eropa dan mulai menggunakan mata uang euro (Marco, 2002). Semua negara anggota UE diharapkan berpartisipasi dalam EMU. Kriteria konvergensi adalah serangkaian persyaratan masuk bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan UE. Kriteria tersebut berisikan persyaratan yang perlu dipenuhi dan kerangka kerja waktu yang perlu diselesaikan agar sebuah negara bisa bergabung dengan persatuan moneter ini.

Dalam integrasi ekonomi dan moneter dalam EMU, telah dibedakan antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek moneter. Yunani dikenal sebagai salah satu negara Eropa Selatan yang tergabung dalam EMU namun juga banyak melanggar kriteria konvergensi bersama ketiga partner-nya yaitu Portugal, Italia dan Spanyol yang sering dikenal sebagai negara PIGS (*Portugal, Italy, Greece, and Spain*). Dalam bidang moneter segala hal yang

berkaitan dengan kebijakan moneter dan nilai tukar dari negara-negara anggota diserahkan kepada otoritas supranasional yaitu ECB. Sedangkan di bidang ekonomi yang salah satunya adalah otoritas fiskal tetap dipegang oleh pemerintahan nasional negara-negara anggota namun masih tetap harus sejalan dengan tujuan bersama dari untuk saling bekerja sama dalam bidang kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi makro.

Bergabungnya Yunani dalam Eurozone awalnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri beberapa negara di Eropa Utara dan Eropa Barat sudah lebih maju dan mapan. Akibatnya, terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB per kapita yakni dari hampir 90 persen PDB per kapita rata-rata di tahun 1980 menjadi turun dibawah 80 persen pada tahun 1992. Rasio utang terhadap PDB ialah salah satu cara untuk memperkirakan apakah suatu negara akan mampu membayar utangnya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemungkinan sebuah negara untuk *default* (tidak bisa melunasi utang) karena pemerintahnya meminjam terlalu banyak dibanding kemampuan negaranya secara keseluruhan untuk membayar kembali (Anggito, 2011). Istilah lain untuk Rasio utang terhadap PDB adalah utang pemerintah atau utang negara yaitupinjaman dari pihak-pihak asing seperti negara sahabat; lembaga internasional (IMF, World Bank); dan pihak lain yang bukan penduduk negara yang bersangkutan. Antara tahun 1980-1990an Yunani memiliki utang yang besar terkait dengan defisit anggaran. Pada tahun 1974, Yunani memasuki babak baru pemerintahan dari junta militer menjadi Sosialis. Pemerintahan baru tersebut kemudian mengambil banyak utang untuk membiayai subsidi, dana pensiun, gaji PNS dan lain-lain. Utang tersebut terus menumpuk sampai pada tahun 1993 posisi utang Yunani sudah mencapai diatas PDB. Angka utang tersebut terus menumpuk, bahkan jika ditarik lebih jauh banyaknya utang Yunani telah ada sejak tahun 1893.

Pada tahun 2009, krisis *subprime mortgage* yang melanda dunia memberikan pukulan terhadap perekonomian Yunani. Dua industri terbesar di negara tersebut yaitu pelayaran dan pariwisata mengalami tekanan hebat sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan sebesar 10% pada tahun 2009 (IMF, 2010). Dalam upaya memastikan bahwa kondisi perekonomiannya masih terkendali, pemerintah Yunani membayar beberapa bank kreditur seperti *Goldman Sachs* untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnya dari jumlah utang pemerintah. Hingga akhirnya rekayasa terhadap laporan keuangan Yunani terbongkar, dan pada akhir tahun 2009 Perdana Menteri George A. Papandreou merevisi defisit anggaran pemerintahnya menjadi 12.7% terhadap

PDB dari sebelumnya 6,7%. Pada November 2009 Pemerintah Yunani melaporkan revisi defisit fiskal kepada UE. Defisit yang besar juga berarti beban utang yang berat pula, rasio utang 115% pada tahun 2009 dan diproyeksikan untuk naik ke 125% dari PDB pada tahun 2010, ini merupakan tingkat tertinggi dalam Eurozone (Armando, 2012).

Krisis ekonomi yang dialami Yunani menimbulkan dampak negatif bagi negara itu sendiri serta UE yang merupakan kawasan terintegrasi satu sama lainnya secara ekonomi. Hubungan ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain di kawasan UE membuat sebuah permasalahan yang terjadi pada sebuah negara akan dirasakan juga oleh negara lainnya di kawasan tersebut dan menjadi masalah sistemik. Pengaruh negatif dari krisis ekonomi Yunani sangat dirasakan oleh negara-negara UE dan mengakibatkan kepanikan. Berikut ini penulis akan mencoba memaparkan beberapa dampak dari krisis ekonomi Yunani yang dirasakan negara Yunani dan sekaligus kawasan UE.

2. Alasan-Alasan Uni Eropa Memberikan *Financial Assistance Package* Kepada Yunani

Hubungan saling ketergantungan yang terjadi diantara negara UE membuat rentannya masalah satu negara dan masalah negara tersebut akan mempengaruhi negara-negara yang ada di sekitarnya. Masalah ekonomi yang terjadi di Yunani akan mempengaruhi perekonomian UE disebabkan oleh organisasi internasional tersebut memiliki mata uang tunggal yang menyebabkan hubungan keuangan satu negara dengan negara lain, perdagangan bursa saham di bidang properti yang besar, adanya kebijakan perbankan dari bank UE untuk menanggulangi setiap bank pemerintah yang bermasalah dengan dana finansial yang berasal dari pajak negara UE yang membuat para bankir menjadi ketagihan dan juga khususnya bagi Yunani yang memiliki total utang lebih dari 60% dari PDB melebihi yang ditetapkan negara UE (Federiga, 2012).

Keamanan ekonomi bagi UE merupakan hal yang penting karena adanya sistem mata uang tunggal membuat negara-negara lain di UE menjadi rentan akan satu goncangan di satu pilar euro yang ada. Dampak secara langsung yang signifikan akan dirasakan oleh negara-negara anggota Eurozone. Satu hal yang menjadi korelasi antar satu negara yang terkena krisis di UE akan mengakibatkan dampak negatif bagi negara lainnya di kawasan UE adalah mata uang tunggal euro. Dengan sistem mata uang tunggal ini maka diharapkan akan ada pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan dalam bidang kebijakan moneter dan manajemen ekonomi makro dari masing-masing negara pemimpin UE. Diharapkan berbagai biaya yang sifatnya *overlapping* (tumpang-tindih) akan dihemat dengan adanya mata uang tunggal ini. Sebagaimana diketahui belum

semua negara UE bergabung dalam satu kebijakan UE tentang mata uang tunggal euro.

UE atau seluruh anggota Eurozone utamanya sangat memerlukan pemulihan ekonomi Yunani. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dari Eurozone mengenai aset ekonomi seluruh anggota Eurozone di Yunani dimana Eurozone telah banyak menanamkan modal yaitu melalui perdagangan luar negeri, investasi dan memberikan pinjaman baik bilateral dan multilateral. Jumlah investasi negara-negara UE yang telah tertanam di Yunani sangatlah besar. Negara Eropa yang menanamkan investasinya di Yunani antara lain Jerman, Perancis, Inggris, Belgia, Luxemburg, Belanda, dan Italia.

Investasi terbesar memang datang dari para investor UE. Meskipun investor dari AS juga tidak sedikit, akan tetapi jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah investasi asing dari negara-negara UE. Jumlah investasi AS di Yunani pada tahun 2009 adalah 44.7 juta Euro dan tahun 2010 sebesar 95.4 juta Euro. Sementara negara-negara di luar UE yang mulai banyak menginvestasikan dananya di Yunani adalah Rusia, negara-negara Eropa timur, Arab dan Asia termasuk China yang memfokuskan pada bidang energi, telekomunikasi, pariwisata, transportasi, dan logistik. Sektor bisnis yang paling menarik minat investor asing di Yunani adalah sektor jasa. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan sistem keuangan negara, liberalisasi telekomunikasi, dan stimulasi perdagangan. Sedangkan investasi di bidang energi (listrik dan gas alam) hanya sekitar 6.2% dari total investasi asing yang ada (Richard, 2009).

Kekhawatiran UE terhadap hilangnya aset mereka di Yunani membuat mereka memberikan dana talangan untuk membantu negara itu bangkit dari krisis. Dengan diberikannya dana talangan, UE berharap Yunani mampu bangkit dari keterpurukan. Penyehatan ekonomi Yunani dengan adanya bantuan keuangan dari UE akan memberikan pengaruh terhadap prospek investasi di negara itu. Pemulihan ekonomi Yunani jelas akan berdampak pada tingkat kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Yunani. Oleh sebab itu, UE berkepentingan terhadap masa depan ekonomi Yunani karena terkait dengan kepentingan ekonomi mereka di negara tersebut.

Selain karena faktor tanggung jawab institusional UE, pemberian dana talangan kepada Yunani juga muncul karena faktor-faktor tambahan. Faktor-faktor tambahan itu adalah desakan dari beberapa pihak yakni dari Bank Sentral Eropa (ECB) dan negara anggota UE. UE pada awalnya enggan memberi dana talangan, namun setelah mendapat dorongan dari berbagai pihak akhirnya UE menyadari perannya sebagai 'stabilisator' ekonomi kawasan. Menurut Presiden ECB, negara-negara kawasan pengguna euro harus ikut bertanggung jawab atas masalah yang menimpa Yunani jika

negara tersebut membutuhkan bantuan (Philip, 2012). Selain itu dia juga menekankan pentingnya negara-negara di kawasan pengguna euro memformulasikan peran pengawasan dan pengadilan. ECB mengingatkan bahwa ekonomi UE akan mengalami kekacauan bila tidak segera mengentaskan negara anggotanya dari depresi ekonomi.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa alasan UE memberikan FAP kepada Yunani didorong oleh karena Uni Eropa dibentuk oleh negara-negara anggota benua Eropa atas dasar penguatan ekonomi dan politik regional yang diwujudkan lewat kerjasama setiap negara karena adanya saling ketergantungan (*interdependent*) di antara negara-negara yang bersangkutan. Sehingga ketika suatu negara sudah merasa saling tergantung satu sama lain, maka negara-negara yang saling tergantung satu sama lain tersebut akan selalu menjaga stabilitas dan harmonisasi hubungan mereka. Kedua, pertimbangan bahwa krisis Yunani bisa berdampak lebih luas jika tidak segera ditanggulangi juga menjadi alasan UE memberi FAP pada Yunani. Resiko terburuk yang akan dihadapi negara-negara Eurozone adalah terpuruknya ekonomi kawasan akibat krisis yang terjadi di satu negara. Kebijakan FAP dengan demikian adalah sebuah tindakan rasional untuk mencegah supaya krisis serupa tidak terjadi di negara Eropa lainnya.

Alasan lain dari Kebijakan FAP juga didorong oleh peran UE sebagai 'pemimpin regional' dan 'stabilisator' kawasan. Sebagai pemimpin, UE bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh Negara anggotanya. Sebenarnya, kelambanan UE menanggulangi krisis Yunani berakibat pada perdebatan antara Jerman dan Perancis mengenai FAP. Perancis adalah pendukung FAP sedangkan Jerman menolaknya. Namun setelah didesak oleh kalangan internal UE yaitu dari ECB dan Yunani sendiri serta desakan dari kalangan eksternal UE yaitu dari AS dan G20, Jerman akhirnya sepakat memberikan FAP kepada Yunani. Desakan itu membantu menyadarkan Jerman sebagai Negara terpenting UE.

B. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ___ Restu I. Anna, 2012. *Show Euro 2012 dan Krisis Euro*. Malang: Universitas Negeri Malang
- ___ Francis Castles, 2009. *Pressure Groups and Political Culture (Routledge Revivals): A Comparative Study*. New York: Routledge.
- ___ Alex Mintz, Karl De Rouen, 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- ___ Marco Buti, André Sapir, 2002. *EMU and Economic Policy in Europe*. Edward Elgar Publishing.
- ___ Anggito Abimanyu, 2011. *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- ___ International Monetary Fund Staff, International Monetary Fund. Research Dept., 2010. *World Economic Outlook, October 2010*. International Monetary Fund.
- ___ Richard Youngs, 2009. *Energy Security: Europe's New Foreign Policy Challenge*. Routledge.
- ___ Armando Navarro, 2012. *Global Capitalist Crisis and the Second Great Depression: Egalitarian Systemic Models for Change*. Lexington Books
- ___ Federiga Bindi, Irina Angelescu, 2012. *The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World*. Brookings Institution Press
- ___ Philip Arestis, Malcolm Sawyer, 2012. *The Euro Crisis*. Palgrave Macmillan

